

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. ed. Suryani. PT Bumi Aksara.
- Hikmat, M, Hikmat. (2019). *Komunikasi Politik Dalam Pilkada Langsung*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media2
- Marijan, Kacung. 2012. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. 3rd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mustafa, Delly. 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. REVISI. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Siregar, Fritz Edward. 2020. *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*. pertama. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Zubakhrum, M. 2020. *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Pappas Sinar Sinanti.

Sumber Jurnal

- Annida, Rohim. "ISSN Cetak : 2656-4467 ISSN Online : 2656-8977 STIA Pembangunan Jember" 2, no. 1 (2019): 26–37. (25 Februari 04.11)
- Hartini, Sri. "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (Pns)." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2009): 258–67. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.237>. (20 Februari 02.27)
- Simanjuntak, Novembri Yusuf. "Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 305–458. (25 Februari 02.00)

Bawaslu Kabupaten Indramayu, Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Bawaslu, <https://indramayukab.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban/> (24 Januari 18.56)

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesianomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang No 8 Tahun 2018 mengenai Penanganan kampanye pemilu pasal 1 ayat 10 berbunyi

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Internet:

Adji, Bayu.(2020). *Bawaslu Tasikmalaya Proses 13 Pelanggaran Pilkada*. Dapat diakses pada laman <https://www.republika.co.id/berita/qlbkdq428/bawaslu-tasikmalaya-proses-13-pelanggaran-pilkada>

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, <https://tasikmalayakab.bawaslu.go.id/home> (diakses pada 10 April)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). kbbi.web.id.

KPU Kabupaten Tasikmalaya, <https://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/> (diakses pada 10 April)

Penduduk dan Tenaga Kerja - Jawa Barat
<http://www.jabarprov.go.id/root/dalamangka/DDA2009penduduk3.pdf>
Pemerintah Jawa Barat. (diakses tanggal 1 April 2022)